

PENERAPAN NILAI PANCASILA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR

Application of Pancasila Value in Learning Process in Elementary School

Julia Bea Kurniawaty
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Indraprasta PGRI
julia_bea@yahoo.com

ABSTRAK: Penerapan nilai Pancasila dalam proses pembelajaran di sekolah dasar merupakan tujuan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis, historis, dan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan literature research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar dijumpai kendala bahwa masih ada beberapa anak yang sulit dinasihati serta ada anak yang memiliki kebiasaan di luar sekolah yang kurang baik kemudian terbawa ke sekolah. Karena itu, seyogyanya sekolah harus mampu mengatasi kendala tersebut dengan terus melakukan pembiasaan, bimbingan, dan pembinaan kepada siswa serta menjalin kerjasama yang baik (sinergis) antara pihak sekolah dengan orangtua mereka.

Kata Kunci: Penerapan, Nilai, Pancasila, Pembelajaran, Sekolah Dasar

ABSTRACT: The application of Pancasila values in the learning process in elementary schools is the goal in this study, the method used is a juridical, historical, and conceptual approach. Types and sources of legal materials used are primary and secondary, data collection techniques using literature research. The results showed that strengthening Pancasila values in elementary schools encountered obstacles that there were still some children who were difficult to advise and there were children who had bad habits outside of school and then brought them to school. Therefore, schools should be able to overcome these obstacles by continuing to do habituation, guidance, and coaching to students and establish good (synergic) cooperation between the school and their parents.

Keywords: Implementation, Value, Pancasila, Learning, Elementary School

PENDAHULUAN

Sulianti (2018: 111) menyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan, nilai-nilai Pancasila dan tanggap terhadap tuntutan perubahan

zaman yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik itu sosial, spiritual, intelektual, dan profesional dalam bidang keilmuannya. Pendidikan adalah dasar ilmu yang harus dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan aturan yang sudah berlaku untuk setiap warga negara berhak mendapatkan



pengajaran atau wajib belajar selama 12 tahun sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, pendidikan merupakan dasar yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia agar tidak buta akan hukum maupun ilmu yang berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Kehidupan bangsa Indonesia memerlukan adanya implementasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang mencerminkan kepribadian asli masyarakat bangsa Indonesia. Nilai, norma, dan etika yang selama ini terkandung dalam Pancasila benar-benar menjadi bagian yang sangat utuh dan bulat serta dapat menyatu dengan kepribadian setiap warga negara Indonesia sehingga dapat membentuk pola sikap, pola pikir, dan pola tindakan serta memberikan arah pada masyarakat bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan sebuah nilai karakter yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Peran Pancasila dalam Pendidikan tentulah sangat penting di Indonesia, karena Pancasila memiliki peran penting dalam pembentukan karakter melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara juga merupakan falsafah hidup bagi seluruh warga negara Indonesia karena nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Pancasila merupakan suatu hal yang mendasar bagi setiap kehidupan warga negara untuk dijadikan sebuah patokan atau pegangan dalam menjalin

kehidupan sebagai warga negara yang baik atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan sebuah tolak ukur akan keberhasilan dari implementasi nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara nyata nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia.

Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam proses pembelajaran karena penerapan nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada siswa mampu menguasai materi, namun yang terpenting adalah bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa sehingga anak didik memiliki karakter dan pola tingkah laku yang baik. Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka dalam lima tahun terakhir, antara lain: (1) secara substansial, PKn terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), dan pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren). PPKn sebagai mata pelajaran memiliki misi dalam mengembangkan keadaban Pancasila yang diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggung jawab.

Selain dengan penanaman nilai-nilai pancasila dalam proses pembelajaran, sebagai salah satu wujud penanaman nilai-nilai Pancasila yang diberikan kepada siswa melalui proses pembelajaran adalah dengan memberikan pemahaman dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Proses pembelajaran dianggap sebagai hal yang mendesak bagi anak didik dalam fungsinya untuk membimbing generasi muda untuk secara sukarela mengikatkan diri pada nilai-nilai dan norma moral yang berkarakter. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat agar masyarakat mematuhi dan menganut nilai-nilai dalam Pancasila karena nilai yang terkandung dalam pancasila mempunyai banyak makna untuk kehidupan sehari-hari dalam beragama, memberikan pendapat

dan lain-lain (Dewantara & Nurgiansah, 2021).

Materi Pancasila dalam Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari PPKn untuk ruang lingkup Pancasila adalah:

1. Menghayati dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara; menganalisis dan mendemonstrasikan langkah-langkah untuk mewujudkan Pancasila sebagai Dasar Negara.
3. Menghayati dan menghargai nilai-nilai yang melekat dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Menganalisis dan menyaji nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun sayangnya, lembaga pendidikan saat ini kurang terlihat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila karena kurangnya filter atau pembatas masuknya globalisasi yang kini hampir seluruh masyarakat Indonesia menerapkannya. Sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata tanpa mempedulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam



pancasila sangat berguna dan bermanfaat (Nurgiansah, 2020).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk siswa sebagai warga negara yang Pancasila. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter dikemukakan oleh Samsuri (2011: 20) yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar tidak sekadar membekali siswa ke jenjang selanjutnya tetapi penanaman moral yang diharapkan dapat membentuk warga negara yang baik.

Sumiyati (2008: 1) menyatakan bahwa PKn sebagai pendidikan nilai, moral, dan norma tetap ditanamkan pada siswa sejak usia dini. Jika siswa sudah memiliki ketiga nilai moral tersebut, maka tujuan untuk membentuk sebuah warga negara yang baik akan mudah diwujudkan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam prakteknya PKn menghadapi kendala yang mengakibatkan jauhnya tujuan pembelajaran. Pernyataan dari kelemahan PKn diungkapkan oleh Udin S. Winataputra (2009: 37) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran dan penilaian lebih menekankan pada dampak instruksional yang terbatas pada penguasaan materi pada dimensi kognitif. Dengan demikian apa yang diperoleh peserta didik bukan bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik namun masih dalam lingkup kognitif.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa kelemahan mata pelajaran seperti Pendidikan Agama dan PKn lebih difokuskan pada masalah kognitif. Artinya berkaitan dengan pengetahuan siswa tentang mata pelajaran tersebut, namun kurangnya untuk memberikan pembekalan

apa saja yang harus mereka lakukan ketika berhadapan dengan dunia nyata dan di mana mereka akan bertemu dengan semua orang yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti sejauh mana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di sekolah dasar sebagai rumusan dalam penelitian ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Soemitro, 2010) dan dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara para murid dan guru. Data sekunder menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945 dan peraturan pemerintah. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto, 2003). Teknik pengumpulan data menggunakan *literature research* (Dewantara & Nurgiansah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai adalah ukuran, patokan, anggapan-anggapan, dan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan

(Nurgiansah, 2021). Menurut Nurgiansah (2021), fungsi nilai di antaranya yakni sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam masyarakat. Nilai dapat mendorong, menuntun, dan menekan seseorang untuk berbuat baik. Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat.

Setiap bangsa harus memiliki konsepsi, ide, dan cita-cita luhur. Mengenai hakikat yang paling dalam dari negara serta hakikat yang paling mendalam dari hukum negara, konsepsi kenegaraan dan hukum setiap negara bangsa memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan latar sejarah, kondisi sosial budaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai bangsa negara adalah kebesaran, keluasan, dan kemajemukannya. Konsepsi tentang dasar negara dirumuskan dengan lima prinsip utama titik temu (yang mempersatukan keragaman bangsa), titik tumpu (yang mendasari ideologi, norma dan kebijakan negara), dan titik tuju (yang memberi orientasi kenegaraan, kebangsaan) bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan pancasila. Kelima nilai dasar pancasila itu adalah:

1. Ketuhanan yang maha esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembelajaran pada dasarnya adalah kemampuan yang diharapkan peserta didik setelah memperoleh

pengalaman belajar. Tujuan mempunyai jenjang yang luas atau umum hingga kepada yang sempit atau khusus. Semua tujuan itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan pembelajaran harus berpusat pada perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan, karenanya harus dirumuskan secara operasional, dapat diukur, dan dapat diamati ketercapaiannya (Nana Sudjana dan Wari Suwariyah, 2010).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran melalui pendidikan sangat penting karena pendidikan nasional pada dasarnya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Diharapkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, maka akan membentuk manusia yang berpendidikan, berpengetahuan, dan berkarakter.

Adapun konteks kehidupan global, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selain harus meneguhkan keadaban Pancasila juga harus membekali peserta didik untuk hidup dalam kancah global sebagai warga dunia (*global citizenship*). Hal ini dikarenakan warga negara tidak hanya hidup dalam lingkungan nasional tetapi juga hidup dengan bangsa lain dalam pergaulan Internasional. Selain itu, perlu disadari bahwa di dunia ini tidak hanya ada kita, akan tetapi ada orang lain yang bermukim di seluruh belahan dunia. Maka, kita harus banyak mempelajari tentang pendidikan warga global (Hakop Walangadi, Elmia Umar, Kian Palilati, 2020).

Oleh karena itu, substansi dan pembelajaran Pancasila perlu diorientasikan untuk membekali warga negara Indonesia agar mampu hidup dan berkontribusi secara optimal pada dinamika kehidupan abad 21. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran sekolah dasar selain mengembangkan nilai dan moral Pancasila, juga mengembangkan semua visi dan keterampilan abad 21 sebagaimana telah menjadi komitmen global. Lebih dari itu sebagai landasan filosofis, empat konsensus kebangsaan telah menjiwai lahirnya Kurikulum 2013. Empat konsensus kebangsaan tersebut adalah: (1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup; (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai komitmen terhadap bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud kesadaran atas keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

Empat konsensus bernegara tersebut secara eksplisit juga diajarkan dalam struktur kurikulum mata pelajaran PPKn di setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK). Artinya, setiap bab materi atau Kompetensi Dasar (KD) dan dalam Kompetensi Isi (KI) pada PPKn, harus memuat 4 konsensus bernegara secara eksplisit dalam pembelajaran. Tidak hanya memuat aspek pengetahuan (kognitif), tetapi juga mencakup aspek sikap dan keterampilan. Inilah yang membedakan secara tegas mata pelajaran PPKn dalam

struktur Kurikulum 2013 dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam struktur Kurikulum 2006.

Upaya dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan. Beberapa kegiatan di sekolah dasar yang dapat mendukung untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sila Kesatu, Ketuhanan yang Maha Esa, berimplikasi pada kegiatan misalnya salat Berjamaah untuk Kelas IV-VI. Puspitasari, Djunaedi, & Putra (2012) berpendapat bahwa manusia selalu berusaha ingin mereplikasi dunia suci ke dunia nyata, dengan berusaha menerima kebaikan Tuhan melalui kegiatan religius. Karena itu, suatu wilayah secara material terkait dengan berbagai (Goh & van der Veer, 2016). Mulai dari kegiatan wudhu, guru mengawasi setiap siswa terutama kelas IV yang sekiranya belum menghafal gerakan wudhu dan mengondisikan siswa agar tidak membuat keributan di area musala. Siswanto (2013) mengemukakan bahwa salat juga merupakan pelatihan pembinaan disiplin dan kontrol diri. Hal ini dapat membantu siswa dalam membiasakan sikap disiplin pada setiap kegiatan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kegiatan untuk saling menghargai setiap kegiatan ibadah yang dilakukan di lingkungan sekolah, saling membantu dalam suatu perayaan agama misalnya saat perayaan hari raya Idul Adha, pelajar yang beragama selain Islam, ikut membantu mendistribusikan daging kurban untuk masyarakat yang berhak.
2. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berimplikasi antara lain pada kejujuran, semangat juang, ketulusan, cinta kasih, toleran, tanggung jawab, saling menggembarakan, saling memuliakan, tidak egois, cinta Tanah

Air, menghormati etika, moral, dan hukum, menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional.

Pembelajaran yang dilakukan guru tidak hanya sekadar mentransfermasikan pengetahuan (interaksional) *an sich* melainkan harus terdapat proses internalisasi nilai (transformasional) yang menggiring kepada proses melibatkan seluruh potensi manusiawi siswa; kognitif, afektif, dan psikomotorik secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Tidak hanya siswa perempuan atau laki-laki saja melainkan semua siswa yang ada di kelas berhak mengikuti pembelajaran di bawah bimbingan guru. Tindakan yang dilakukan guru tersebut merupakan penguatan nilai keadilan. Durrani (2018) mengemukakan bahwa pendistribusian pendidikan yang tidak merata akan menyebabkan konflik. Maka, untuk menghindari konflik, guru menanamkan nilai keadilan sejak dini.

3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, berimplikasi pada sikap dan perilaku menjunjung toleran, tidak memaksakan kehendak, menghormati kebhinekaan, bela negara, dan mementingkan kehidupan orang banyak di atas kepentingan pribadi
4. Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berimplikasi misalnya dalam pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Pachur dan Spaar (2015) mengemukakan bahwa musyawarah dapat dikendalikan secara sadar. Kegiatan ini melatih siswa menanamkan nilai demokrasi di sekolah, karena ketua kelas tidak dipilih murni oleh guru melainkan mengikutsertakan siswa dalam pemilihan ketua kelas. Apabila siswa tidak diikutsertakan dalam pemilihan ketua kelas, berarti praktik demokrasi tidak berhasil. Menerima

pendapat orang lain dalam diskusi antarkelompok menjadi bagian dari proses pendidikan, proses menentukan tujuan lokasi untuk kegiatan wisata (*study tour*) juga dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

5. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berimplikasi pada sikap dan perilaku saling berbagi, peduli, dan memiliki solidaritas dan sebagainya.

Keseluruhan kegiatan di atas dilaksanakan dalam rangka menguatkan (*reinforcement*) nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar yang memiliki elemen warga sekolah yang heterogen. Kegiatan di atas melibatkan warga sekolah untuk ikut serta dalam kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila mengalami beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran jika tidak diatasi dengan serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar dijumpai kendala bahwa masih ada beberapa anak yang sulit dinasihati serta ada anak yang memiliki kebiasaan di luar sekolah yang kurang baik kemudian terbawa ke sekolah. Karena itu, seyogyanya sekolah harus mampu mengatasi kendala tersebut dengan terus melakukan pembiasaan, bimbingan, dan pembinaan kepada siswa serta menjalin kerjasama yang baik (*sinergis*) antara pihak sekolah dengan orangtua mereka. Sedangkan secara didaktik metodik maka menjadi tugas pokok, fungsi, gurulah dalam mengembangkan kurikulum yaitu dengan melakukan berbagai kreativitas dan tindakan inovatif melalui penggunaan berbagai metode, pendekatan, dan model pembelajaran yang berorientasi pada kebermaknaan, menyenangkan, dan berbobot.

SIMPULAN DAN SARAN



Partisipasi sebagai warga sekolah dasar sangat berguna bagi keberhasilan program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan siswa sehari-hari. Upaya penguatan nilai-nilai Pancasila melalui partisipasi warga sekolah sangat berkaitan dengan perubahan sosial di lingkungan sekolah karena proses di dalamnya berkaitan dengan munculnya permasalahan sosial yang mengakibatkan melemahnya nilai-nilai Pancasila. Sekolah harus berupaya menguatkan nilai-nilai Pancasila dengan mengubah siswanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya berdasarkan Pancasila.

Penerapan nilai-nilai Pancasila pada siswa di tingkat sekolah dasar, merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar, karena di tingkat inilah, para siswa belajar dari para guru berbagai hal mendasar dalam pendidikan seperti bagaimana cara membaca dan menulis yang baik dan benar, begitu pula dengan pengenalan terhadap nilai-nilai Pancasila. Para guru memiliki tanggung jawab yang besar terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila karena hal ini dilakukan dengan cara khusus serta disesuaikan dengan tingkat usia para siswa. Cara ini dilakukan agar penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diterima secara efektif oleh para siswa. Di samping itu, para guru pun harus mengajak para siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila (*learning to do*) dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka akan terbiasa (*habit*) berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu.

Dukungan dari berbagai pihak terkait yakni pihak sekolah, para orangtua siswa, dan *stakeholder* lainnya sangat menentukan kualitas keberhasilan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Peran sekolah dan orangtua sama pentingnya dengan peran guru, karena di luar jam sekolah, peran orangtua sangat besar dalam membimbing dan pengawasan penerapan nilai-nilai

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam konteks proses pembelajaran secara khusus, peran kepala sekolah pun tidak kalah pentingnya, karena sebaik apapun program kurikulum, kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana (*instrumental input*), dan lingkungan (*environmental input*) yang kondusif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada para siswa, tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh kehadiran dan keberpihakan sosok kepala sekolah dalam keseluruhan proses pendidikan pada umumnya di sekolah.

Oleh karena itulah penerapan nilai-nilai Pancasila di tingkat sekolah dasar sangat fundamental karena proses pembentukan nilai-nilai (*values*) pada setiap individu dimulai dari tingkat pendidikan dasar, karena itulah ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa "lebih mudah membentuk kebiasaan baik daripada mengubah kebiasaan buruk."

Dengan demikian, sesungguhnya hal terpenting yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah keterlibatan diri kita agar dapat tampil menjadi *role model* bagi siapa pun; orangtua bagi anak-anaknya dan para guru bagi murid-muridnya. Sebuah doktrin pedagogik klasik mengatakan: "kita tidak dapat mengajarkan apa yang kita ketahui, kita tidak dapat mengajarkan apa yang kita kehendaki, kita hanya dapat mengajarkan apa yang memang ada pada diri kita." Karena itu, marilah kita "bermain" nilai-nilai Pancasila bersama anak-anak didik kita. "*Surgant Fueri et, Ludant Coramnubis*" (suruh anak-anak mempersiapkan diri dan bermain di depan kita).

PUSTAKA ACUAN

----- (2021). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya



- Membentuk Karakter Jujur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9 (1), 33–41.
- Durrani, N., & Halai, A. (2018). Dynamics of gender justice, conflict and social cohesion: Analysing educational reforms in Pakistan. *International Journal of Educational Development*, 61(January), 27–39.
- Goh, D. P., & Van der Veer, P. (2016). Introduction: The sacred and the urban in Asia. *International Sociology*, 31 (4), 367–374.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP.
- Nana Sudjana dan Wari Suwariyah. (2010). *Model-Model Mengajar CBSA*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In Solok: CV Mitra Cendekia Media.
- Nurgiansah, T. H., Dewantara, J. A., & Rachman, F. (2020). The Implementation of Character Education in the Civics Education Syllabus at SMA Negeri 1 Sleman. *Jurnal Etika Demokrasi*, 5 (2), 110–121.
- Pachur, T., & Spaar, M. (2015). Domain-specific preferences for intuition and deliberation in decision making. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 4 (3), 303–311.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Puspitasari, P., Djunaedi, S. A., & Putra, H. S. A. (2012). Ritual and space structure: Pilgrimage and space use in historical urban kampung context of Luar Batang (Jakarta, Indonesia). In *ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies* (Vol. 36, hal. 350–360). Bandung: Procedia - Social and Behavioral Sciences 36.
- Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Yogyakarta: Diandra.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta.
- Siswanto, F. Z. (2013). Hubungan antara kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. *EMPATHY Jurnal Fakultas Psikologi*, 2 (1).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat PT*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sulianti, Ani. (2018). Revitalisasi Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Life Skill. *Citizenship jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6 (2), PP. 110-117. DOI: <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship>.



Sumiati. (2008). Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Jakarta : Pustaka Jaya.

Walangadi, Hakop, Elmia Umar, Kian Palilati. (2020). Membentuk siswa sebagai global citizen melalui mata pelajaran pkn di sekolah dasar. Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo “Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar”
<file:///C:/Users/USER/Downloads/402-998-1-PB.pdf> diunduh pada 24 Okt pber 2020 jam 16:01.

Winataputra, Udin S. (2006). *Konsep dan Strategi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah: Tinjauan Psiko-Pedagogis* (Paper). Pamulang.